

**KOLABORASI ANTARA APARATUR BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)
DIY DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dwi Agustina

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

dwiagustina1808@gmail.com

Abstrak. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat dikatakan sebagai laboratorium mini bencana, hal ini dikarenakan potensi terjadinya bencana di DIY sangat besar. DIY memiliki 12 ancaman bencana yaitu: Banjir, Epidemik & Wabah penyakit, Gelombang Ekstrem & Abrasi, Gempa Bumi, Tsunami, Gagal teknologi, Kekeringan, Letusan Gunung Api, angin Kencang, Tanah Longsor, Kebakaran, dan Bencana Sosial.

Dengan adanya beberapa Jenis ancaman Bencana tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah dituntut lebih siap dalam menurunkan risiko jumlah korban apabila terjadi bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tidaklah dapat dilakukan oleh satu pihak saja, sesuai dengan amanat Undang-Undang No 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Penanggulangan bencana pemerintah tidak boleh melakukan sendirian dan harus melibatkan multi stakeholder.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi langsung, Wawancara mendalam dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, BPBD, dan beberapa anggota Forum PRB Yogyakarta. dan Penelaahan terhadap Dokumentasi tertulis.

Pemerintah Daerah Yogyakarta menyadari bahwa pelibatan multi stakeholder diperlukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. atas dasar inisiasi dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat gempa bantul maka dibentuklah sebuah forum sebagai wadah berkumpulnya para stakeholder dari berbagai unsur yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana atau lebih sering disebut Forum PRB DIY. Dengan adanya forum ini para aktor melakukan fungsi masing-masing dengan cara berkoordinasi dan saling bekerjasama.

Penelitian ini yang mengacu pada kolaborasi antara Pemerintah DIY dan Forum PRB DIY mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan bencana di DIY saat ini telah dilakukan oleh berbagai multi aktor secara kolaboratif. Masing-masing aktor telah di bagi-bagi perannya sesuai dengan keahlian masing-masing. Dalam *Collaborative Governance* dapat dilihat melalui dua Dimensi yaitu Sistem Konteks dan dimensi pendorong. Melalui dua dimensi tersebut dalam penelitian ini melihat bagaimana kolaborasi yang terjadi diantara Pemerintah DIY dan Forum PRB DIY.

Kata Kunci: Bencana, Penyelenggaraan penanggulangan bencana, Multi Stakeholder, Collaborative Governance

Abstract. Yogyakarta Special Region (DIY) can be regarded as a mini-disaster laboratory, this is because the potential for disaster in DIY is very big. DIY has 12 disaster threats: Flood, Epidemic & Outbreak, Extreme & Abrasion, Extreme & Abrasion, Earthquake, Tsunami, Failure Technology, Drought, Volcano Eruption, High winds, Landslide, Fire and Social Disasters.

With the existence of several types of threats Disaster is certainly a challenge for the Government of Yogyakarta Special Region. The government is expected to be better prepared to reduce the risk of casualties in the event of a disaster. Implementation of disaster management can not be done by one party only, in accordance with the mandate of Act No. 24 of 2007 stating that the implementation of disaster management government should not do alone and must involve multi

stakeholders.

This research uses descriptive qualitative research method, with data collecting technique through direct observation, in-depth interview with Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, BPBD, and some members of PRB Yogyakarta Forum. and review of written documentation.

Local Government of Yogyakarta realized that multi-stakeholder involvement is needed in disaster management. on the basis of the initiation of various stakeholders involved in the implementation of disaster management during the earthquake bantul then formed a forum as a forum for gathering of stakeholders from various elements of the Forum Disaster Risk Reduction or more often called DIY DRR Forum. With this forum the actors perform their respective functions by coordinating and working together.

This study, which refers to the collaboration between the DIY Government and DIY DRR Forum, has resulted that the implementation of Disaster Management in Yogyakarta has now been done by various multi-actors collaboratively. Each actor has been divided into roles according to their respective expertise. In Collaborative Governance can be seen through two dimensions of the Context System and the driving dimension. Through these two dimensions in this study see how the collaboration between DIY Government and Froum DRR DIY.

Keywords: *Disaster, Disaster Management, Multi Stakeholder, Collaborative Governance*

PENDAHULUAN

Bencana merupakan proses dinamis hasil kerja ancaman (*hazards*) terhadap komponen ekonomi, politik, dan ekologis yang disebut kerentanan. Kerentanan berkaitan erat dengan kesenjangan (*inequality*) yang dihasilkan dari proses pembangunan, sehingga pembangunan wajib mengintegrasikan faktor bencana demi keberlanjutannya. Manajemen pembangunan berkelanjutan perlu mengandalkan kebijakan dan praktik pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.

Permasalahan penelitian merujuk pada pengalaman penanggulangan bencana yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia yang masih mengalami berbagai kendala, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Kendala di tingkat pemerintah terlihat pada lemahnya koordinasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, baik dalam tahap pra bencana, pada saat terjadi bencana, maupun pada saat pasca bencana.

Peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lain dalam penanggulangan bencana yang belum optimal dipengaruhi oleh belum adanya landasan operasional penanggulangan bencana atau belum dipahami secara utuh dalam pelaksanaannya Hasil penelitian

menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang maksimal dalam penanggulangan bencana dengan adanya dukungan penuh dari berbagai pihak terutama aparat pemerintah. Namun demikian, belum dijumpai penelitian yang khusus melakukan penilaian terhadap kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non pemerintah mendetail terkait kegiatan penanggulangan bencana, sehingga sangat penting untuk dilakukan.

Menyadari dengan Adanya berbagai permasalahan yang dialami Pemerintah daerah dalam tahapan manajemen bencana, Pemerintah Daerah DIY berusaha melakukan Kolaborasi dengan pihak lain, sesuai dengan amanat UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana bahwa kegiatan penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Maka dengan itu Pemerintah DIY berkolaborasi dengan Forum PRB DIY dalam upaya kegiatan pengurangan risiko bencana serta kegiatan penanggulangan bencana di DIY.

Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum PRB DIY) adalah Forum adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan (*multy stakeholders*) DI. Yogyakarta yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko

bencana (PRB) di wilayah DI.Yogyakarta. Sebagai Platform Pengurangan Risiko Bencana di tingkat provinsi yang menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kolaborasi & koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas-aktivitas PRB melalui proses konsultatif dan partisipatif yang selaras dengan pelaksanaan kerangka kerja PRB sebagaimana ditetapkan kebijakan nasional. Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kontribusi dalam pengurangan risiko bencana melalui advokasi, pengawasan, fasilitasi dan konsultasi yang memungkinkan terjadinya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang tanggap dan tahan bencana. Bentuk kerjasama yang terkoordinasi dengan baik antar berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam situasi kesiapsiagaan dalam manajemen penanggulangan bencana tentu saja akan menentukan performa yang diberikan pada saat penanganan bencana.

Tantangan-tantangan yang muncul dalam proses penanganan korban bencana adalah bagaimana membangun keharmonisan dalam bekerjasama antar sektoral terkait yang terlibat dalam penanggulangan bencana. munculnya berbagai masalah pasca bencana, seperti banyaknya korban yang tidak memperoleh layanan kesehatan yang memadai, tidak meratanya bantuan logistik, banyaknya korban yang tidak terjangkau program bantuan, informasi yang tidak pasti, kebijakan yang berubah-ubah, dan seterusnya merupakan indikasi yang memperlihatkan bentuk kerjasama yang belum terkoordinasi secara optimal.

Berangkat dari beberapa peran yang dilakukan Forum PRB DIY dalam Penanggulangan Bencana serta beberapa program yang dilakukan bekerja sama dengan pemerintah yang menjadi bagian dari forum RPB ini maka penelitian ini ingin melihat ***Bagaimana Kolaborasi Antara Aparatur Pemerintah DIY Dan Forum PRB DIY Dalam Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.***

Kerangka Teoritik

Secara umum dijelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terikat untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan Ansell dan Gash mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai Sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau asset publik. Definisi tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, antara lain:

- 1) Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
- 2) Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.
- 3) Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
- 4) Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.
- 5) Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.
- 6) Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Definisi ini dapat dimaknai bahwa forum tersebut ada pada sebuah keterikatan formal sehingga disebutkan hanya berkisar pada kerjasama antara lembaga publik, aktor publik dengan aktor non-publik. Berbeda halnya dengan definisi *collaborative governance* yang dijelaskan Agrawal dan Lemos bahwa definisi *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada stakeholder yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas

adanya “*multipartner governance*” yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama publik-privat dan privat-sosial. Definisi hampir serupa disampaikan oleh Balogh dkk (2011) dijelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Kerjasama kolaboratif masing-masing pihak diikat oleh adanya kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh para pihak sangat mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama muncul karena adanya suatu keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi publik dengan mitranya dari organisasi di sektor privat. Keduanya merasa bahwa masalah atau kepentingan tersebut dapat diselesaikan secara lebih mudah apabila mereka bersama-sama bekerja untuk mencari solusi terhadap masalah atau kepentingan bersama tersebut. Masalah atau kepentingan bersama menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi berkembangnya kolaborasi antara organisasi publik dan organisasi mitranya di sektor privat. Menurut Fosler menjelaskan secara lebih rinci menjelaskan konsep kolaborasi dengan mengatakan bahwa kerjasama yang bersifat kolaboratif melibatkan kerjasama antar pihak yang intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan alignment dalam tujuan, strategi, agenda, sumber daya dan aktivitas. Kedua institusi pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun visi bersama (*shared vision*) dan berusaha mewujudkannya secara bersama-sama. Untuk itu mereka menyatukan atau setidaknya

melakukan aliansi secara vertikal mulai dari sasaran, strategi, sampai dengan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan bersama yang mereka yakini lebih bernilai dari tujuan yang dimiliki oleh masing-masing.

Dalam kerjasama kolaboratif, visi bersama ini menjadi dasar bagi masing-masing pihak untuk merumuskan tujuan, strategi, alokasi, sumberdaya, dan aktivitas masing-masing sehingga kesemuanya memiliki kontribusi terhadap terwujudnya visi bersama tersebut. Dalam rangka mengembangkan kerangka kerja *collaborative governance* dalam kajian ini, maka teori yang bersangkutan dengan tata-kerangka dapat dikontekstualisasikan dengan fokus penelitian yang berbeda-beda. Sehingga dapat mengidentifikasi *drivers, engagement processes, motivational attributes* dan *joint capacities* yang dapat memungkinkan pengambilan keputusan bersama. Proses penulisan kerangka kerja dari *collaborative governance* dimulai dengan mencari kerangka konseptual yang relevan dengan studi empiris, yakni memahami literatur-literatur yang mengkaji *cross-sector collaboration, collaborative planning, collaborative processes, network management, collaborative public management, environmental governance* dan *conflict resolution*.

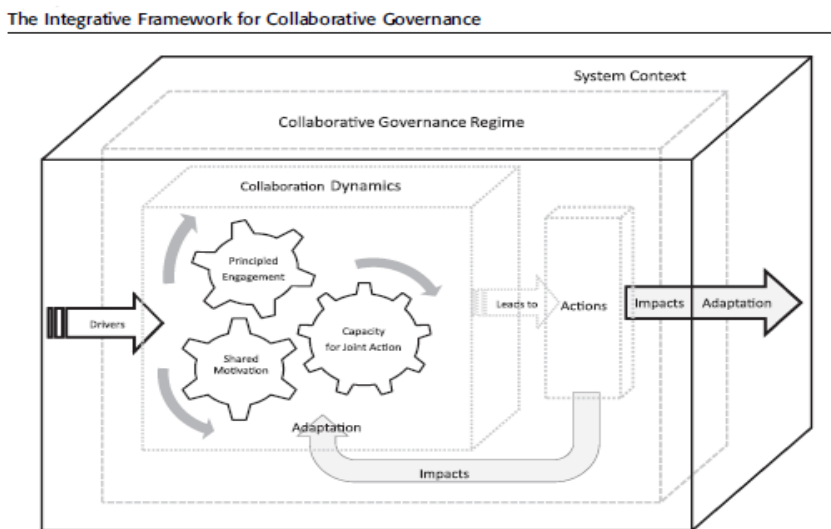
Framework collaborative governance memiliki berbagai dimensi, yaitu *system context*, konsep *collaborative governance*, dan dinamika kolaborasi. Dimensi-dimensi tersebut digambarkan seperti berikut (Balogh, 2011) pada Gambar 1.

1. Dimensi pertama digambarkan dengan kotak terluar yang merupakan ruang lingkup/ *system context* yang menaungi *system context* ini menghasilkan peluang-peluang dan batasan-batasan dan mempengaruhi dinamika kolaborasi dalam hal permulaan dan seterusnya. Dari *System Context* ini nanti juga muncul Driver-driver termasuk kepemimpinan, Insentif Konsekuensi, Ketergantungan dan ketidakpastian, yang membantu menginisiasi dan mengatur arah bagi *Collaborative Governance*.

2. Dimensi kedua merupakan bagian dari konsep *collaborative governance* yang terdiri dari dinamika kolaborasi dan aksi kolaborasi.
3. Dimensi ketiga merupakan dinamika kolaborasi yang terdiri atas tiga komponen, yaitu: *principled engagement*, *shared motivation* dan *capacity for joint action*.

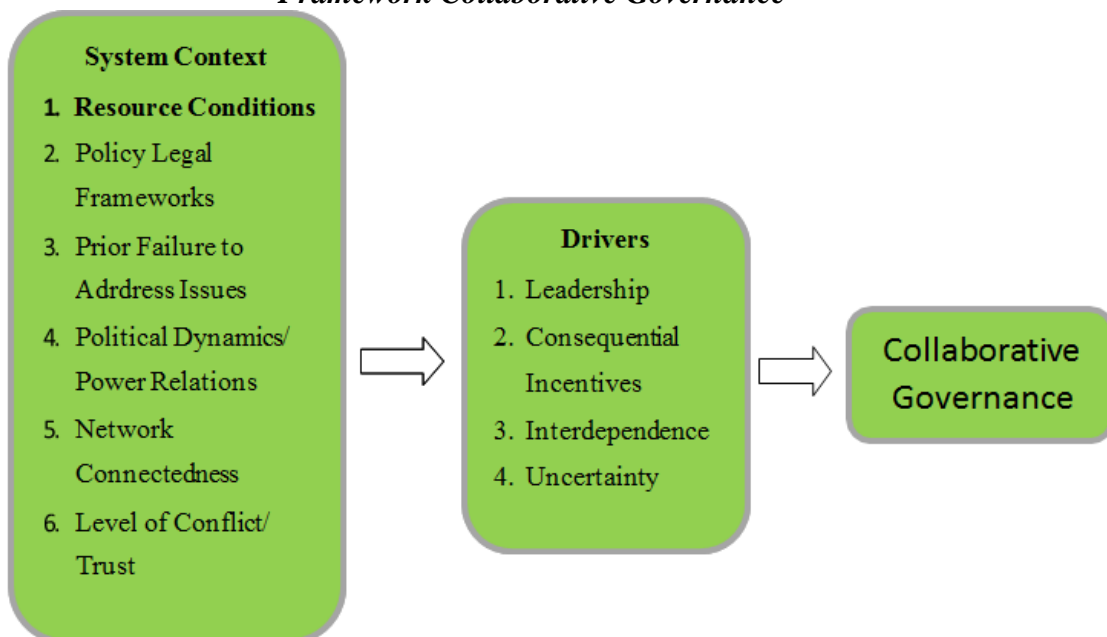
Dalam penelitian ini juga akan membahas bagaimana setelah System context dan driver mempengaruhi kolaborasi yaitu dengan membahas dinamika dari kolaborasi tersebut. Elemen- elemen spesifik dalam setiap komponen dijelaskan pada gambar di bawah ini pada Gambar 2.

Gambar 1
The Integrative Framework for Collaborative Governance



Sumber: (Balogh, 2011:6)

Gambar 2
Framework Collaborative Governance



(Tabel diadaptasi dan disesuaikan dari Model Balogh ddk: 2011)

1. Berdasarkan kerangka penelitian di atas, *System Context* merupakan kondisi lingkungan yang menaungi keberlangsungan *collaborative governance system context* ini menciptakan peluang dan kendala yang mempengaruhi parameter umum lain dari *collaborative governance*. *System context* yang direpresentasikan dalam kerangka ini, bukan sebagai serangkaian kondisi awal tetapi sebagai ruang dari dimensi lainnya karena kondisi eksternal dapat mempengaruhi dinamika dan kinerja kolaborasi tidak hanya di awal tetapi pada setiap saat selama *collaborative governance* berjalan, sehingga membuka kemungkinan dan tantangan baru. Beberapa elemen utama dalam *system context* yang mungkin mempengaruhi sifat dan prospek *collaborative governance* dalam penelitian ini, antara lain: kondisi sumberdaya, kebijakan dan kerangka hukum, tingkat konflik dan kepercayaan, sosial-ekonomi atau budaya kesehatan dan keragaman.

Elemen *system context* yang dapat membedakan atau mempengaruhi *collaborative governance* yang terbentuk, antara lain:

- a) *Resource Condition*, menjelaskan kondisi sumberdaya yang dimiliki apakah perlu diperbaiki, ditingkatkan atau bahkan dibatasi.
- b) *Policy and Legal Framework*, kebijakan dan kerangka hukum termasuk administrasi, peraturan atau yudikatif.
- c) *Prior Failure to Address Issues*, pelajaran kegagalan masa lalu dapat mengambil pelajaran atas kegagalan di masa lalu masing-masing stakeholder.
- d) *Political Dynamics/Power Relations*, Dinamika Politik atau Kekuatan Relasi adalah bagaimana dinamika politik atau kekuatan relasi yang mempengaruhi jalannya kolaborasi.
- e) *Network Connectedness*, Hubungan jaringan dapat digolongkan kepada manajemen jaringan sebuah cara untuk membangun nilai-nilai kepemimpinan dalam tipe relasi antar aktor yang sifatnya horizontal.
- f) *Level of Conflict/ Trust*, terjadinya

konflik antara kepentingan masing-masing pihak yang bekerja sama dan bagaimana konflik tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan sehingga berdampak pada hubungan kerja.

2. Secara umum diakui bahwa sebuah kondisi hadir pada awal terjadinya kolaborasi dapat memfasilitasi atau mencegah kerjasama antara pemangku kepentingan dan antara instansi dan pemangku kepentingan, banyak kerangka cenderung menggabungkan *system context* dan kondisi dengan *driver* tertentu dalam kolaborasi. Namun, dalam *framework* ini, variabel *system context* dipisahkan dengan *drivers*, tanpa *drivers* maka dorongan untuk kolaborasi menjadi terhambat dan tidak berkembang. Komponen-komponen yang termasuk dalam *drivers*:

- a) *Leadership*, mengacu pada sosok seorang pemimpin yang dapat berinisiatif untuk memulai dan membantu mempersiapkan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan *collaborative governance* dengan segala kapasitas yang dimilikinya.
- b) *Consequential incentives*, mengarah pada bagian baik internal (masalah, kebutuhan akan sumber daya, kepentingan, atau kesempatan) maupun eksternal (krisis, ancaman, atau kesempatan yang bersifat situasional/ institusional) *drivers* untuk aksi kolaborasi. Insentif konsekuensial tidak selalu bersifat negative, dengan adanya insentif maka akan mendorong para pemimpin dan anggota dalam kerjasama akan terlibat bersama-sama.
- c) *Interdependence*, kondisi ketika individu dan organisasi tidak dapat mencapai sesuatu dengan usaha dan kapasitas satu pihak, untuk itu mengapa tindakan kolaboratif dapat berkembang untuk dilaksanakan.
- d) *Uncertainty*, ketidakpastian menjadi tantangan utama dalam mengelola permasalahan publik. Ketidakpastian kolektif tentang bagaimana kelompok-kelompok berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah, dengan kata lain berbagi- bagi dalam mengurangi resiko.

Ketidakpastian kolektif tentang bagaimana mengelola masalah sosial juga berkaitan dengan *driver* lain yaitu *interdependence/* ketergantungan.

Selain teori terkait dengan *Collaborative Governance* penelitian ini juga mengacu pada teori yang terkait dengan bencana dan manajemen bencana, yang mana menurut United Nations Development Program (UNDP), badan PBB yang mengurus pembangunan mendefinisikan bencana sebagai berikut:

“ A serious disruption of the functioning of a community or a society involving widespread human, material, economic or environmental losses and impacts, which exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources ”

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Didalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (*disaster management*), risiko bencana didefinisikan sebagai interaksi antara kerentanan suatu daerah dengan ancaman bahaya (*hazards*) yang ada. Ancaman bahaya, khususnya bahaya yang berasal dari alam bersifat tetap karena merupakan bagian dari dinamika proses alami pembentuk struktur bumi baik dari tenaga internal maupun eksternal, sedangkan tingkat kerentanan suatu daerah dapat dikurangi melalui berbagai usaha peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi struktural maupun non struktural, sehingga kemampuan dalam menghadapi ancaman tersebut semakin meningkat. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap:

Prabencana.

Dalam tahapan ini menurut Undang-undang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007 di bagi ke dalam dua tahapan yaitu

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan kebencanaan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: 1)Perencanaan penanggulangan bencana,2)Pengurangan risiko bencana.,3)Pencegahan,4)Pepaduan dalam perencanaan pembangunan, 5)Persyaratan analisis risiko bencana, 6)Pelaksanaan dan Penegakan rencana tata ruang Dan ketentuan pendirian bangunan, 7)Pendidikan dan pelatihan

Situasi Terdapat Potensi Bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi bencana di dalam Undang-undang No.24 Tahun 2007dalam Pasal 44 meliputi tahapan: Kesiapsiagaan, dan Mitigasi.

Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasca Bencana

Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana dalam Tahapan ini yang menjadi focus adalah pemulihan dan pembangunan kembali baik masyarakat maupun fasilitas- fasilitas umum yang ada di masyarakat. Dalam tahapan pasca dibagi menjadi dua tahapan, yaitu: **Rehabilitasi dan rekonstruksi.**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Menurut Locke, Spirduso, & Silverman¹⁰, “penelitian kualitatif pada

hakikatnya bertujuan untuk memahami situasi, peristiwa, kelompok, ataupun interaksi sosial tertentu pada *setting* alamiah". penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan bagaimana kolaborasi antara Aparatur Pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam penanggulangan bencana di Provinsi Daerah Yogyakarta. Kolaborasi yang terjadi lebih dilihat bagaimana kolaborasi ini berawal serta bagaimana masing-masing *stakeholder* menjalankan perannya baik aparatur birokrasi dan Anggota Forum PRB DIY. Pemerintah DIY menyadari bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya dapat diselesaikan oleh salah satu pihak saja, baik pemerintah, LSM/NGO, Komunitas, Swasta ataupun masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-undang No 24 Tahun 2007 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak di dalamnya.

Kolaborasi yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemaparan merujuk kepada dimensi *Collaborative Governance* yang di dasari pada *System Context* dan *Driver*. kolaborasi yang terjadi tertuju pada keterlibatan setiap pihak yang didasarkan kerjasama. Setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Perbedaan tugas dan tanggung jawab merupakan karakteristik yang tersendiri dalam kolaborasi ini. .

Untuk melihat kolaborasi yang terjadi antara Pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dibagi kedalam tahapan-tahapan Manajemen Penanggulangan bencana yaitu:

Kolaborasi Aparatur Pemerintah DIY dan Forum PRB DIY Dalam Tahapan Pra Bencana.

Dalam situasi pra bencana terdiri dari dua tahapan yaitu tahap Situasi tidak terjadi bencana dan situasi berpotensi terjadinya bencana. Untuk melihat kolaborasi antara Pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam tahap pra bencana kita akan melihatnya kedalam dimensi *Collaborative governance*, indikator kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Forum PRB dalam tahapan bencana yang tentunya memiliki kelemahan serta kelebihan dalam berkolaborasi. Kelemahan dan kelebihan tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah Ini:

Tabel 1. Kelebihan dan kelemahan Dimensi Kolaborasi antara Pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam Tahapan Pra Bencana

Dimensi Collaborative Governance	Kelebihan	Kelemahan
Sistem Konteks		
1.sumber Daya	Pemerintah Banyak dibantu oleh anggota Forum PRB pada Tahapan ini, anggota Forum banyak terlibat dalam pembuatan perencanaan kegiatan pengurangan resiko bencana.	Pemerintah terkesan lebih pasif karena sumber daya yang digunakan banyak dari pihak non Pemerintah (Anggota Forum PRB) hal ini dikarenakan para anggota forum PRB berasal dari tenaga ahli kebencanaan.

Dimensi Collaborative Governance	Kelebihan	Kelemahan
2.kebijakan dan kerangka Hukum	Dalam penyusunan kebijakan pemerintah mendapatkan banyak masukan dari berbagai stakeholder lain. Bagi forum PRB yang diberikan kesempatan menyusun kebijakan tentunya memperlihatkan bagaimana pemerintah DIY sudah mulai menerapkan sistem bottom up dengan memasukkan aspirasi dari perwakilan masyarakat terkait kebijakan yang disusun.	Adanya bantuan dari anggota forum PRB dalam menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan membuat seolah pemerintah DIY lebih mempercayakan penyusunan kebijakan dilakukan oleh forum, padahal pemerintah seharusnya lebih memiliki peran dalam menyusun sebuah kebijakan.
3.Pembelajaran di masa lalu	Adanya kolaborasi yang terjadi dalam tahapan pra bencana membuat adanya pertukaran informasi yang terjadi diantara Pemerintah DIY dan anggota Forum PRB DIY, pengalaman dari masing-masing dapat dijasikan pelajaran yang bermanfaat ketika menyusun program serta sebagai early warning tersendiri bagi para aktor ketika mengalami situasi yang berpotensi bencana.	Pertemuan yang kurang rutin antara pemerintah dan anggota Forum PRB membuat proses pembelajaran dan saling tukar informasi dirasakan masih kurang.
4.Dinamika Politik/Kekuatan Hubungan	Dinamika yang terjalin dengan baik dalam tahapan pra bencana membuat adanya program-program yang berbasis pengurangan risiko bencana dapat dimasukkan ke dalam program-program atau	Situasi dinamika politik yang terkadang berubah dapat merubah prioritas kegiatan yang diajukan. Hal ini terkait dengan dukungan untuk tetap memprioritaskan aspek

Dimensi Collaborative Governance	Kelebihan	Kelemahan
	rencana kerja yang dibuat oleh pemerintah daerah ataupun anggota forum PRB.	pengurangan risiko bencana dalam setiap program kegiatan.
5. Jaringan	Dengan jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Diy dan anggota Forum PRB DIY membuat adanya nilai dan norma yang dianut para anggota sehingga pondasi awal untuk pertukaran sumberdaya dapat meudahkan karena masing-masing anggota	Pelibatan pertukaran sumber daya yang terkadang hanya melibatkan anggota yang sering terlibat membuat anggota lain menjadi kurang berpartisipasi.
	sudah memahami peran nya.	
6. Tingkat Konflik /Kepercayaan	Dengan memiliki tujuan yang sama yaitu dalam tahap pra bencana focus dari tujuan berkolaborasi adalah upaya pengurangan risiko bencana maka potensi konflik yang terjadi sangatlah kecil.	Konflik yang sangat kecil membuat kolaborasi yang terjadi terkesan datar sehingga tidak ada menimbulkan masalah bagi organisasi yang terlibat hal ini nantinya akan membuat kejenuhan tersendiri yang membuat potensi konflik dari eksternal dapat terjadi.
Pendorong		
A. Kepemimpinan	adanya dukungan dari seluruh pimpinan masing-masing membuat kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik.	Pemimpin dari forum PRB dan Pemerintah DIY kedepannya agar lebih dapat merangkul semua pihak baik dari pemerintah maupun anggota forum.
Konsekuensi insentif	Masing-masing dari pemerintah dan Forum PRB mendapatkan insentif yang berbeda dalam pelaksanaan kolaborasi ini tetapi dengan adanya kolaborasi ini dirasakan saling menguntungkan kedua belah pihak.	Terkesan adanya saling memanfaatkan baik dari pemerintah DIY ataupun anggota Forum PRB DIY.
C. Saling ketergantungan	Pemerintah dan Forum saat ini bekerja secara bersama dalam mengedepankan kegiatan pengurangan risiko bencana,	Saling ketergantungan ini terkadang membuat pemerintah dan forum PRB saling mengandalkan satu sama lain.

Dimensi Collaborative Governance	Kelebihan	Kelemahan
	pemerintah dan Forum tidak dapat dipisahkan dalam menentukan program	
D. ketidakpastian	Kegiatan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana adalah kegiatan yang tidak memiliki waktu yang pas, tetapi dengan adanya persiapan terkait kegiatan tentunya bermanfaat pada saat tanggap Darurat	Ketidakpastian akan menghadapi potensi bencana terkadang membuat seluruh pihak lengah dalam pembuatan kegiatan pengurangan risiko bencana.

Kolaborasi Aparatur Pemerintah DIY dan Forum PRB DIY Dalam Tahapan Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Tanggap darurat bencana merupakan kegiatan yang sangat krusial terutama berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Menurut Shaluf dalam Kusumasari¹¹ mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi kerusakan harta benda dan meningkatkan pemulihan awal dari insiden tersebut. Gambaran tersebut memperlihatkan

bahwa urgensi dari tanggap darurat sangat penting terutama koordinasi yang dilakukan secara tepat waktu guna meminimalisir korban yang ditimbulkan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dikendalikan oleh kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Untuk melihat kolaborasi antara Pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam tahap tanggap darurat kita akan melihatnya kedalam dimensi *Collaborative governance*, kolaborasi yang terjadi diantara Pemerintah DIY dan Forum PRB DIY pada masa tanggap darurat. Beberapa indikator kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Forum PRB dalam tahapan tanggap darurat dijabarkan diatas tentunya memiliki kelemahan serta kelebihan dalam berkolaborasi. Kelemahan dan kelebihan tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah Ini:

Tabel 2. Kelebihan dan kelemahan dimensi Kolaborasi antara Pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam Tahapan Tanggap Darurat

Dimensi Collaborative Governance	Kelebihan	Kelemahan
Sistem Konteks		

Dimensi Collaborative Governance	Kelebihan	Kelemahan
1.Sumber Daya	Dalam masa tanggap darurat pelibatan forum PRB hanya sebatas pada pembuatan gugus tugas saja sehingga pemerintah masih terbantu sampai pembuatan gugus tugas kegiatan tanggap darurat.	Peran forum yang hanya sampai pembuatan gugus tugas kegiatan tanggap darurat membuat forum tidak berperan banyak dalam masa tanggap darurat.
2.Kebijakan dan kerangka Hukum	Dalam penyusunan peraturan terkait kegiatan tanggap darurat dibantu oleh anggota forum sehingga peraturan yang berkaitan dengan tanggap darurat masih melibatkan aktor non pemerintah.	Untuk penentuan status darurat hanya terletak pada pimpinan daerah. Dan tidak boleh melibatkan aktor diluar pemerintah.
3.Pembelajaran di masa lalu	Pertukaran informasi yang terjadi dari pengalaman masa tanggap darurat yang pernah dialami oleh anggota forum dan pemerintah membuat adanya proses pembelajaran dalam masa tanggap darurat.	Informasi yang didapatkan belum tentu sesuai dengan jenis bencana yang terjadi di wilayah DIY sehingga pemerintah dan anggota forum juga harus menganalisis kembali apakah pelajaran dari pengalaman di masa lalu dapat diterapkan.
4.Dinamika Politik/Kekuatan Hubungan	Dinamika yang terjalin dengan baik dalam tahapan pra bencana membuat adanya program-program yang berbasis pengurangan risiko bencana dapat dimasukkan ke dalam program-program atau rencana kerja yang dibuat oleh pemerintah daerah ataupun anggota forum PRB.	Situasi dinamika politik yang terkadang berubah dapat merubah prioritas kegiatan yang diajukan. Hal ini terkait dengan dukungan untuk tetap memprioritaskan aspek pengurangan risiko bencana dalam setiap program kegiatan.
7.Jaringan	Dengan jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah DIY dan anggota Forum PRB DIY membuat kegiatan bekerjasama dalam masa tanggap darurat tidaklah sulit untuk dijalankan.	Ketergantungan diantara pemerintah dan anggota forum PRB dalam masa pra bencana tentunya mempengaruhi dalam kegiatan tanggap darurat.
8.Tingkat Konflik /Keperceyann	Tingkat konflik sangatlah kecil karena dalam masa tanggap darurat tujuan utama dari seluruh stakeholders adalah bagaimana penyelamatan korban bencana.	Tidak adanya konflik membuat anggota forum PRB dan Pemerintah DIY tidak terlalu mempedulikan hubungan yang terjalin diantara mereka.
Pendorong		

Dimensi Collaborative Governance	Kelebihan	Kelemahan
1. Kepemimpinan	adanya dukungan dari seluruh pimpinan masing-masing membuat kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik.	Pemimpin dari forum PRB dan Pemerintah DIY kedepannya agar lebih dapat merangkul semua pihak baik dari pemerintah maupun anggota forum.

Kolaborasi Aparatur Pemerintah DIY dan Forum PRB DIY Dalam Tahapan Pasca Bencana

Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana dalam Tahapan ini yang menjadi fokus adalah pemulihan dan pembangunan kembali baik masyarakat maupun fasilitas-fasilitas umum yang ada di masyarakat. Dalam tahapan pasca bencana forum PRB tidak berperan secara resmi, disini anggota Forum PRB ikut terjun dalam kegiatan tetapi tidak mengatasnamakan Forum PRB melainkan dengan bendera masing-masing organisasi. Dalam penjelasan dibawah peneliti mencoba menganalisis bagaimana kolaborasi yang terjadi antara

anggota Forum PRB dan Pemerintah DIY walaupun sudah tidak membawa nama Forum PRB secara penuh untuk melihat kolaborasi antara Pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam tahap pra bencana kita akan melihatnya kedalam dimensi *Collaborative governance* sebagai berikut:

Dari paparan telah dijabarkan bagaimana kolaborasi yang terjadi diantara Pemerintah DIY dan stakeholders lain pada tahapan pasca bencana. Beberapa indikator kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Forum PRB dalam tahapan pasca bencana dijabarkan diatas tentunya memiliki kelemahan serta kelebihan dalam berkolaborasi. Kelemahan dan kelebihan tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah Ini:

Tabel 3. Kelebihan dan kelemahan dimensi Kolaborasi antara Pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam Tahapan Pasca Bencana

Dimensi Collaborative Governance	Kelebihan	Kelemahan
Sistem Konteks		
A. Sumber Daya	Dalam Tahapan Pasca bencana sumber daya yang turut serta dalam kegiatan ini melibatkan multi stakeholder dan pemerintah daerah.	Dalam tahapan pasca bencana forum PRB tidak ikut berperan secara resmi hanya beberapa anggota forum yang membawa nama masing-masing organisasinya dalam kegiatan ini sehingga sumber daya yang ikut dalam kegiatan pasca bencana tidak seluruhnya anggota forum PRB.

Dimensi Collaborative Governance	Kelebihan	Kelemahan
B. Kebijakan dan kerangka Hukum	Dalam penyusunan peraturan terkait kegiatan pasca bencana dibantu oleh anggota forum sehingga peraturan yang berkaitan dengan pasca masih melibatkan aktor non pemerintah.	Dalam pembuatan kebijakan untuk pemulihan pasca bencana ditentukan secara penuh oleh pemerintah daerah.
C. Pembelajaran di masa lalu	Keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pemulihan pasca bencana dapat menjadi ajang saling sharing beberapa stakeholder yang terkait.	Tidak adanya kolaborasi secara resmi antara pemerintah dan forum PRB sehingga pertukaran pembelajaran di masa lalu antara forum PRB dan pemerintah kurang terjadi.
D. Dinamika Politik/Kekuasaan Hubungan	Dinamika yang terjalin dengan baik dalam tahapan pasca bencana membuat kegiatan-kegiatan pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan baik.	Situasi dinamika politik dalam pasca bencana berpengaruh dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk pemulihan pasca bencana.
E. Jaringan	Dengan jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah DIY dan organisasi lain dapat bekerjasama dalam masa pemulihan.	Kurangnya koordinasi antara pihak dalam tahapan ini membuat kegiatan pemulihan yang dilakukan organisasi-organisasi diluar pemerintah kurang mendapat perhatian/dukungan dari Pemerintah
F. Tingkat Konflik/Kepercayaan	Upaya penyelesaian konflik dengan memfokuskan tujuan utama dalam kegiatan pemulihan menjadi alternative tersendiri dalam penyelesaian konflik yang terjadi.	Dalam masa pemulihan ini sangat memungkinkan terjadinya konflik antar masyarakat dan pemerintah terkait dengan relokasi.
Pendorong		
A. Kepemimpinan	adanya dukungan dari seluruh pimpinan masing-masing membuat kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik.	Kedepannya sebaiknya seluruh pimpinan dapat berkoordinasi dengan baik, sehingga konflik-konflik yang terjadi dapat diminimalkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari analisis data dan paparan terkait kolaborasi Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah DIY dan Forum PRB DIY dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kolaborasi yang terjadi antara Aparatur Birokrasi pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY terjalin dengan baik dalam tahap pra bencana hal ini dikarenakan peran Forum PRB sangat banyak dalam tahapan pra bencana baik dari segi dimensi sistem konteks yaitu sumber daya, kebijakan, pelajaran di masa lalu, dinamika politik, jaringan, dan tingkat konflik serta faktor pendorong yang baik dalam tahapan pra bencana.
2. Kolaborasi yang terjadi antara Aparatur Birokrasi pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY pada tahap tanggap darurat melemah hal ini dikarenakan peran dari Forum PRB DIY yang berkurang dalam tahapan ini. Hal ini dikarenakan peran Forum PRB DIY hanya sampai pembagian Kluster dalam tahapan tanggap darurat.
3. Kolaborasi yang terjadi antara Aparatur Birokrasi pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY pada tahap pra bencana sangat melemah hal ini dikarenakan peran Forum PRB dalam tahap Pasca Bencana sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah kerja sama antara Pemerintah dengan anggota Forum dengan membawa nama organisasi masing-masing tidak membawa nama forum PRB DIY.

Saran

Beberapa saran, ide atau gagasan yang dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Yogyakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Anggota Forum PRB

DIY adalah Sebagai berikut:

1. Pada tahapan pra bencana kolaborasi yang terjadi perlu dipertahankan, hal ini dikarenakan sangat membantu kinerja pemerintah dan forum PRB DIY dalam upaya pengurangan risiko bencana.
2. Kolaborasi antara Pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam tahap tanggap darurat seharusnya jangan melemah tetapi harus semakin menguat hal ini agar tahap tanggap darurat dapat dilakukan dengan baik apabila adanya kolaborasi dari seluruh stakeholder sebagai upaya pengurangan korban akibat terjadinya bencana.
3. Pada tahap pasca bencana sebaiknya terjalin Kolaborasi antara Aparatur Birokrasi pemerintah DIY dan Forum PRB DIY dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY yang lebih baik. Dengan tetap melibatkan forum PRB DIY dalam kegiatan-kegiatan pasca bencana. hal ini tentunya juga dapat menjadi evaluasi bagi seluruh stakeholder nantinya ketika pembuatan kegiatan pra bencana.
4. Perlu adanya peningkatan kapasitas oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana agar kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press
- Balogh, S, dkk. 2011. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*, *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Blaikie, P. 2002. "Vulnerability and Disaster" dalam *The Companion to Development Studies*. V. Desai dan R. Potter (Eds). London: Arnold
- Charoengngam, C., & Leungbootnak, N. (2005). *Post-Tsunami Disaster*

- Reconstruction Management : A Case Study of Thailand.* Asian Institute of Technology.
- Choi, T., & Robertson, P. J., *Caucuses in collaborative governance: Modeling the for an emerging era;* Public Administration Review, 70(s1), s89-s99; 2010
- Coppola, D.P. (2007). *Introduction to International Disaster Management.* Burlington, MA: Elsevier.
- Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. (2007). *Kajian Kebijakan Penanggulangan Banjir di Indonesia, 2007.* Kajian Kebijakan Penanggulangan: Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Universitas Indonesia
- De Leeuw, A.C.J., 2000, *Bedrijfskundig Management*, Van Gorcum, Assen, Dutch
- D. Ngar-yin dan P. Hills. 2010. *Collaborative Governance for Sustainable Development: Wind Resource Assessment in Xinjiang and Guangdong Province, China.* Copyright ©2010 John Wiley & Sons, Ltd and ERP Environment. Wiley online Library.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif.* Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Dynes, R.R., Quarantelli, E.L., & Kreps, G.A. (1972). *A Perspective On Disaster.* Newark: Disaster Research Center, University of Delaware.
- Emergency Management Australia. 1998. *Australian Emergency Manual Series.* Part I. Manual 3. ACT. Australia: EMA
- Fadhilah, Ifan Rasyid. 2013. Skripsi: *Manajemen Jaringan Organisasional: Studi Kasus FPRB (Forum Pengurangan Resiko Bencana) Dalam Bencana Merapi 2010.* Jurusan Politik dan Pemerintahan. UGM: Yogyakarta.
- Fosler, R.S. (2002). *Working Better Together : How Government, Business, and Profit Organizations Can Achieve Public Purposes through Cross Sector Collaborations, Aliances, and Partnership.* Washington, D.C/ /;
- Independetn Sector
- Gillespie, D.F., & Streeter, C.L. (1987). *Conceptualizing and Measuring Disaster Preparedness.* International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 5 (2), pp.155-176
- Godschalk, D.R., (1991). *Disaster Mitigation and Hazard Management.* In T. Drabek & G. Hoetmer (Eds), *Emergency Management: Principles and Practice for Local Government.* Washington, DC: International City Management Association.
- Hardaker, J.B., Huirne R.B.M. and Anderson, J.R., 1997, *Coping with risk in agriculture.* CAB International, Wallingford, United Kingdom
- Kaufan and Dake. 2009. *Understanding and Advancing Cross Sector Collaboration in Homeland Security and Emergency Management.*
- King, D. (2007). *Organization in Disaster.* Natural Hazards, 40, pp.657-665
- Kirchenbaum, Alan. 2004. *Chaos Organization and Disaster Management.* Marcel Dekker. New York
- Kumorotomo, Wahyudi. dkk, 2013. *Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative Governance di Sektor Publik.* Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL, UGM
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal.* Gava media: Yogyakarta.
- Labadie, J.R. (1984). *Problems in Local Emergency Management.* Pp 489-494
- LIPI dan UNESCO, 2006. *Kajian kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami.* LIPI, Jakarta
- Masmuh, Abdullah, 2008. *Komunikasi Organisasi Dalam Perspektif Teori dan Praktek,* UPT Penerbitan UMM: Malang
- McEntire, D.A., & Myers, A. (2004). *Preparing Communities for Disasters: Issues and Processes for Government Readiness.*

- Disaster Prevention and Management, 13(2). Pp.140-152
- Michael, Bruce, Setiawan B dan Rahmi, D.H. 2000. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mileti, D. S (1999). *Disaster by Design*. Washington DC: Joseph Henry Press.
- Moe, T.L., & Pathranarakul, P. (2006). *An Integrated Approach to Natural Disaster Management: Public Project Management and Its Critical Success Factors*. Disaster Prevention and Management, 15 (3), 396-413
- Moe, T.L., Gehbauer, F., Senitz, S., & Mueller, M. (2007). *Balanced Scorecard for Natural Disaster Management Project*. Disaster Prevention and Management, 16 (5), 785-806
- Moleong, Lexi J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Locke, L., Spirduso, W. W., & Silverman, S. (2000). *Research proposals that work*. 4th Edition. New York: Sage Publishing Co.
- Pratikno. 2008. *Manajemen Jaringan Dalam Perspektif Strukturasi*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Volume 12, Nomor 1 (Mei 2008). Yogyakarta : MAP UGM.
- Perry, R.W., & Lindell, M.K. (2003). *Preparedness for Emergency Response: Guidelines for the Emergency Planning Process*. Disasters, 27(4), pp.336-350
- Perry, M. (2007) *Natural Disaster Management Planning: A Study of Logistics Managers Responding to the Tsunami*. *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*, No.37 No.5, pp. 409-433
- Robbins, P. Stephen. and Timothy A. Judge, 2009, *Organizational Behavior*, 13th Edition, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, PP.209-586
- Shaluf, I.M. (2008). *Technological Disaster Stages and Management*. *Disaster Prevention and Management*. 17 (1), pp.114-126
- Sink, D.W. (1998). "Interorganizational Collaboration", dalam Shafaritz, J.M. (Ed.), *The Encyclopedia of Public Policy and Administration*. Boulder, CO: Westview
- Stake, R. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks, CA: Sage pp. 49-68. Sutara, Agus Ardianto, 2001. *Atasi Konflik Etnis*, Global Pustaka, Yogyakarta
- Tingsanchali, T. (2005). *Tsunami Attacks and Disaster Management. Paper presented at the Presentation of Findings by AIT Team of Expert on Tsunami Affected Areas in the South of Thailand*.
- Turner, J.R., & Muller (2004). *Communication and Co-Operation on Projects Between the Project Owner as Principal and the Project Manager as Agent*. European Management Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol 22 No.3, pp. 327-336
- Wolensky, R.P & Wolensky, K.C. (1990). *Local Government's Problem with Disaster Management: A literature Review and Structural Analysis*. Policy Studies Review, 9(4), 703-725
- Wyner, A.J., & Mann, D.E. (1983). *Seismic Safety Policy In California: Local Governments and Earthquakes*. Santa Barbara: Department of political Science, University of California.
- Quarentelli, E. L. (1997). *Ten Criteria for Evaluating the Management of Community Disasters*. Disasters, 21(1) pp.39-56
- Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Dokumen :**
- UU 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
- Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala BNPB 03 tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana